

**ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DALIT
INDIA DI ERA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SANTRIA AGUSTI

18323121

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DALIT

INDIA DI ERA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SANTRIA AGUSTI

18323121

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN DALIT INDIA DI ERA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.,St., M.A

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 13 April 2022



Santria Agusti

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas segala doa, perjuangan, motivasi, pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dan nasihat yang selalu kalian berikan.

Kakak, Adik dan Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, dukungan dan nasihat yang selalu kalian berikan.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2018

Terima kasih atas segala kebersamaan dan perjuangan selama masa perkuliahan di HI UII.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Albaqarah: 286)

“Secapek-capeknya kamu jangan pernah menyerah, karena Tuhan akan selalu memberi jalan bagi orang-orang yang selalu berusaha”

(Santria Agusti)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahu wa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan baik materil maupun spritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.,St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, waktu serta dukungan yang ibu berikan selama masa pengerjaan skripsi saya. Semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.

6. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah kalian salurkan , atas arahannya dan kesabaran kalian selama lebih kurang 3,5 tahun ini. Kalian adalah dosen-dosen yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu lakukan dapat menjadi amal jariyah dan mendapat balasan dari Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lupa mendoakan saya serta mengingatkan kebaikan kepada saya. Terima kasih juga telah memberikan support dalam segala hal kepada saya dan kasih sayang yang tidak pernah terbatas. Tanpa dukungan dari kalian saya tidak akan bisa sekuat sekarang.
8. Kepada kakak perempuan dan adik laki-laki saya, Febri Astuti, Rahma Oktasari, dan Rahmad Hidayad. Terima kasih banyak sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah dan selalu mendukung apapun yang saya lakukan selagi positif.
9. Kepada teman dekat saya, Febi Saputra. Terima kasih telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah hidup saya dan atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga dilancarkan segala rencananya.
10. Kepada teman dekat selama masa perkuliahan ini, Alfiana dan Diana teman baik saya sejak pertama masuk sampai akhir proses perkuliahan. Selalu mendengarkan keluh kesah saya, menasihati saya jika saya salah, dan selalu menjadi teman dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menghadapi saya yang sangat egois ini dengan sabar. Anggun,Siti, Dinda dan Eca yang selalu siap sedia saya ganggu untuk

menanyakan terkait perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi bagian proses perkuliahan ini. Semoga kalian dilancarkan dalam setiap hal yang akan kalian gapai.

11. Teman dalam grup always dadakan alias teman sedari SMP, Leha, Selfi, dan Kiki. Terima kasih selalu siap sedia di grup mendengarkan ocehan dan keluh kesah saya. Semangat memperjuangkan apa yang akan kalian perjuangkan. Semoga kita berteman sampai akhir.
12. Kepada teman-teman semasa SMA saya, Nooer, Ucai, atong, wulan, wenda, yosi, Qeny, dan miies. Terima kasih selalu siap sedia diajak jalan-jalan dengan kedok healing. Kalian sangat luar biasa. Semangat menggapai cita-cita.
13. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HI UII angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya disini. Tanpa kalian mungkin perkuliahan akan sangat hambar walaupun kebanyakan bertemu secara virtual. Segala kenangan di kampus ataupun zoom akan selalu terkenang. Semoga kita bisa sukses sama-sama kedepannya.
14. Kepada teman-teman saya di HI UII, terima kasih sudah menjadi teman saya. Kalian sangat luar biasa.

ABSTRAK

Kekerasan kultural merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya terjadi di kawasan Asia Selatan yaitu India. Fenomena kekerasan kultural terhadap perempuan di India khususnya pada kasta Dalit menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Di mana kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit di India sudah terjadi sejak zaman kuno hingga sekarang pada masa pemerintahan Narendra Modi. Pemerintahan Modi tidak dapat memberikan perubahan yang besar terhadap hidup dan hak-hak perempuan Dalit. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kebijakan yang membuat perempuan Dalit menderita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terjadinya kekerasan terhadap perempuan Dalit India di pemerintahan Modi menggunakan teori kekerasan kultural yang dicetuskan oleh Johan Galtung, dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai agama menjadi faktor yang dominan mendorong terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit India. Selain itu, tingkat patriarki yang tinggi menjelaskan seolah kekerasan kultural ini merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah berhenti setiap era pemerintah.

Kata Kunci: Perempuan Dalit India, Kekerasan Kultural, Narendra Modi

ABSTRACT

Cultural violence is part of human rights violations, one of which occurs in the South Asian region, India. The phenomenon of cultural violence against women in India, especially the Dalit caste, is something interesting to discuss. Where is the violence faced by Dalit women in India has occurred since ancient times until now during the reign of Narendra Modi. The Modi's government has been unable to make a major difference to the lives and rights of Dalit women. This is shown by the existence of policies that make Dalit women suffer. This study aims to analyze how the occurrence of violence against Indian Dalit women in the Modi's government using the theory of cultural violence that was coined by Johan Galtung, in this study it was found that the religious aspect was the dominant factor driving the occurrence of cultural violence against Indian Dalit women. In addition, the high level of patriarchy explains as if this cultural violence is a phenomenon that will never stop in every era of government.

Keywords: *Indian Dalit Women, Cultural Violence, Narendra Modi*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
POSISI PEREMPUAN DALIT DALAM SEJARAH INDIA DAN PADA MASA PEMERINTAHAN MODI	18
2.1 Perempuan Dalit Pra Pemerintahan Modi.....	18
2.2 Perempuan Dalit pada Masa Pemerintahan Modi.....	24
BAB III	37
BENTUK- BENTUK KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DALIT DI INDIA PADA ERA PEMERINTAHAN MODI .	37
3.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama	38

3.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi.....	40
3.3 Kekerasan Kultural dalam Aspek Bahasa	42
3.4 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ilmu Empiris	43
3.5 Kekerasan Kultural dalam Aspek Kosmologi	45
BAB IV PENUTUP	52
2.1 Kesimpulan.....	52
3.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1 : Segitiga Kekerasan Johan Galtung	12
Tabel 1: Tabel analisis NCRB terkait jumlah dan presentase kejahatan terhadap perempuan Dalit Tahun 2014-2019	33
Tabel 2: Tabel terpilih dan tidak terpilih	38
Tabel 3: Hasil Analisis Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Dalit di India pada Masa Pemerintahan Modi	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dapat terjadi dikarenakan ada pihak yang memiliki otoritas sehingga merasa mampu untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada pihak yang lemah. Salah satu isu kekerasan yang begitu menjadi perhatian dunia adalah kekerasan terhadap perempuan. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fenomena global yang tidak dapat dihindari lagi keberadaannya, bahkan di ranah internasional kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Perempuan merupakan objek yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan. Hal ini karena perempuan sering kali dianggap lemah dan tidak berdaya. Selain itu, perempuan juga fisiknya dianggap berbeda dengan pria. Sehingga, hal ini menimbulkan stigma bahwa perempuan merupakan masyarakat golongan kelas dua (Biaison 2005, 305)

Fenomena kekerasan dapat terjadi karena berbagai hal, seperti agama, etnis, budaya, kelompok ataupun gender. Konflik, kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan kerap kali terjadi. Selain itu, kekerasan fisik juga dapat terjadi dalam situasi seperti ini, hal ini terjadi berdasarkan adanya pandangan tradisional yang menganggap bahwa perempuan merupakan hak milik (*property*), dan sebagai objek seksual. Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik saja, namun kekerasan dapat juga terjadi secara non- fisik atau bisa juga tidak terlihat. Seperti kekerasan yang terjadi pada perempuan di India. Masyarakat India yang kehidupan masyarakatnya klasik dan masih

patriarki. Di mana, hal yang meliputi reproduksi, seksualitas, dan kegiatan sosial masih dalam pengaturan nilai- nilai patriarki dan diekspresikan melalui budaya tertentu (Manimekalai 2021, 430- 432).

Di India kuno (3200-2500 SM), sistem kasta tidak ada dan tidak berlaku karena bahkan orang yang paling terpelajar pun adalah perumah tangga yang baik dan memiliki pekerjaan yang bervariasi. Wanita India kuno sama superiornya dengan pria dalam hal pembelajaran, pendidikan, dan kecerdasan. Pilihan untuk pasangannya seumur hidupnya dibuat sesuai dengan keinginannya sendiri dan pernikahan dilakukan sesuai keinginannya setelah dewasa. Dia menghadiri pesta, kompetisi, dan acara keagamaan sesuai keinginannya. Pernikahan kembali para janda muda juga merupakan praktik yang umum. Namun, seiring berjalannya waktu sistem tersebut muncul (Vashistha 2018).

Bentuk dari budaya patriarki dalam masyarakat India melalui simbolisme yaitu memberikan pesan bahwa sebagai seorang perempuan sejati adalah perempuan yang rela berkorban dan tidak menonjolkan diri. Hal ini juga dibuktikan melalui menekankan peran perempuan sebagai istri yang setia dan ibu yang taat. Kemudian, perempuan dilatih untuk tidak menentang diskriminasi, subordinasi, eksploitasi, dan penaklukan di berbagai tingkatan dalam sistem. Ruang gerak perempuan India dibatasi untuk memiliki aspirasi di luar pernikahan. Sehingga perempuan dikendalikan oleh laki- laki. Sampai anak perempuan itu menikah, perlindungan dan kesuciannya dianggap sebagai tanda kehormatan sang ayah (Manimekalai 2021, 429).

India yang merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan sebagai negara urutan kedua dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok. India memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan terkenal akan sistem kasta, dimana sistem kasta ini merupakan kepercayaan yang dianut oleh Hindu, dalam sistem ini memisahkan masyarakat dengan empat kasta. Pemisahan tersebut didasarkan pada pekerjaan, kelahiran, wilayah dan keyakinan terhadap karma. Keempat kasta tersebut adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta ini terbagi-bagi lagi menjadi ratusan bahkan ribuan sub-kasta yang tersebar di berbagai wilayah. Ada salah satu kasta yang sangat termarginalkan dan selalu didiskriminasi dianggap sebagai kasta paling rendah di India yaitu Dalit yang dikenal dengan sebutan *Untouchables*. Perempuan Dalit kerap kali mendapat perlakuan yang tidak adil dan terpinggirkan dari masyarakat dimana mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik dan upacara adat yang layak (Khan 2016, 13-14).

Dalit adalah mereka yang disebut sebagai *chandalas, atishudras, avarnas, panchamas, antayas dan antyavasan*. Dalam kitab suci agama Hindu Dalit adalah "Orang-orang Rusak" dan "Hindu Protestan" bagi Dr. Ambedkar dan "Harijan" bagi Gandhi. Bagi Inggris, Dalit adalah "kelas yang tak tersentuh dan tertekan". Dalit disebut sebagai "kasta terjadwal" dalam konstitusi India. "Dalit" adalah istilah yang layak diadopsi oleh Dalit sendiri untuk menunjukkan fakta bahwa Dalit adalah bagian yang paling tertindas, dieksploitasi dan tidak manusiawi dari masyarakat India (Ramaiah, 1998, 125).

Sistem kasta yang patriarki di India yang mengasumsikan bahwa perempuan Dalit selalu menjadi subjek eksploitasi dan kekerasan karena berasal dari kasta rendah sehingga tidak pantas untuk dihormati. Perempuan Dalit secara rutin menjadi sasaran serangan fisik, pelecehan verbal, pelecehan seksual dan kelalaian medis, dengan yang terakhir menjadi penyebab utama viktimisasi mereka. Sering ditemukan bahwa dokter tidak memeriksa korban perkosaan dengan benar atau membuat laporan yang benar dan lengkap setelah perkosaan, karena perempuan Dalit menghadapi tekanan dari terdakwa, yang kebanyakan dari kasta atas atau bagian masyarakat yang berpengaruh. Yang terakhir dengan demikian menggunakan kontak dan pengaruh mereka untuk mengintimidasi para korban dan keluarga Dalit dan mencegah polisi mendaftarkan kasus apa pun (Fuller 1996, 295- 296).

Perempuan Dalit menghadapi kekerasan verbal, fisik dan seksual di ranah publik dan privat. Di ranah publik perempuan Dalit diserang secara verbal dan fisik, misalnya ketika mencoba mengakses sumber daya publik atau berusaha mencari keadilan setelah insiden kekerasan lainnya. Dalam ranah pribadi, perempuan Dalit diserang karena tidak menjadi istri yang berbakti, tidak melahirkan anak atau anak laki-laki secara khusus atau tidak membawa mahar yang cukup ke dalam perkawinan. Perempuan Dalit menghadapi kekerasan dari anggota masyarakat, anggota polisi yang terlibat, mertua dan keluarganya. Antara norma penaklukan perempuan dan norma budaya mengenai hierarki kasta “alami”, perempuan terus-menerus diserang dan dimanfaatkan (Mahey n.d.).

Perempuan Dalit juga menjadi korban dari kebiasaan sosial dan praktik keagamaan dalam masyarakat Hindu. Kebiasaan tersebut, salah satunya adalah devadasi (pelacuran kuil). Di mana gadis-gadis Dalit dinikahkan orang tuanya dengan dewa desa. Kemudian, gadis-gadis ini dieksploitasi secara seksual oleh tuan tanah kasta atas dan orang-orang kaya yang ada di desa tersebut. Hal ini sudah berlangsung sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan (Sarvesh 2021).

Pemilihan umum Mei 2014 adalah momen penting bagi India pascakolonial, karena menyaksikan kemenangan telak partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang juga dikenal sebagai Partai Rakyat India. Sorotan lain dari putusan elektoral ini adalah bahwa satu partai bisa mendapatkan mayoritas kursi yang jelas, memenangkan 282 dari kemungkinan 543 kursi di Parlemen setelah tiga puluh tahun. Meskipun partai tersebut menikmati mayoritas di majelis rendah, ia telah membentuk pemerintahan koalisi yang menghormati pemahaman pemilu pra-pemilu dengan partai lain. Pemerintah koalisi ini mencakup beberapa afiliasi Hindutva yang mendukung Hinduisme politik militan dan supremasi Hindu, sementara partai koalisi lainnya menyerukan regionalisme (Ansari 2016, 4-6).

Di era kepemimpinannya Modi mengeluarkan kebijakan nol toleransi bagi para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan setelah India dikejutkan dengan kasus pemerkosaan massal dan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Delhi 2012 lalu. Namun, kenyataannya India tetap saja menjadi wilayah yang berbahaya bagi perempuan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Thomson Reuters

Foundation di tahun 2018 bahwa kekerasan seksual, kekerasan kultural dan *human trafficking* menjadi penyebab tersebut. Di mana, perempuan Dalit diperlakukan semakin tidak manusiawi dan semakin parah kasus pemerkosaan yang mereka hadapi. Pengacara Dalit yang menangani kasus diskriminasi kasta dan kekerasan gender menyatakan bahwasanya pada tahun 2019 kasus pemerkosaan terhadap perempuan Dalit meningkat hingga 18,6 persen dibandingkan tahun 2018 (Aryanti 2020).

Berdasarkan laporan dari *National Crime Records Bureau* (NCBR) pada tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan 25 persen kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat Dalit, di mana perempuan menjadi korban terburuk. Pemerkosaan terhadap perempuan Dalit meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun pertama pemerintahan Modi, rata-rata 6 perempuan Dalit diperkosa setiap hari (Kang 2019).

Kemudian data analisis *National Crime Records Bureau*(NCRB) yang telah mencatat 251.068 insiden kejahatan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan Dalit selama 6 tahun yaitu dari 2014 hingga 2019. Kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan Dalit mencapai 15,11%. Kejahatan ini telah meningkat 46% (Report 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penelitian ini akan lebih fokus menganalisis mengenai kekerasan kultural pada perempuan Dalit India Di Era Pemerintahan Narendra Modi. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit India di Era Pemerintahan Modi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi pada perempuan Dalit di India serta untuk mengetahui bentuk atau aspek yang menjadi pendorong kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit Pada Era Pemerintahan Modi.
2. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kekerasan yang dialami perempuan Dalit pada era pemerintahan Modi tidak hanya disebabkan oleh kekerasan langsung dan struktural, namun juga dapat terjadi karena adanya kekerasan kultural yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan. Hal ini berdasarkan atas latar belakang yang telah penulis paparkan. Bahwasanya kekerasan yang dialami oleh perempuan Dalit di India benar-benar memprihatinkan. Sehingga dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat penulis.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk bagian dari Studi Konflik dan Perdamaian yang mana fokus penulis pada penelitian ini terletak pada kekerasan kultural yang dihadapi perempuan Dalit India. Perempuan Dalit dipilih karena penulis melihat kekerasan terhadap perempuan Dalit sudah berlangsung sejak lama

bahkan masih terjadi hingga sekarang. Kelompok Dalit merupakan kasta terendah di India. Penulis melihat kekerasan terhadap perempuan Dalit masih banyak terjadi pada masa Modi. Meskipun sudah dibentuk UU untuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan dan hukum nol toleransi bagi pelaku pada era pemerintahan Modi kekerasan masih tetap terjadi bahkan semakin memprihatinkan. Masyarakat India yang masih hidup dalam budaya patriarki yang sangat tinggi. Sehingga menyebabkan perempuan termarginalkan khususnya perempuan Dalit India yang masih mendapatkan perlakuan kekerasan baik dalam ranah privat maupun publik.

Kemudian, pada penelitian ini ada batasan waktu yaitu pada era pemerintahan Modi. Pemerintahan ini dipilih karena Modi masih menjabat sebagai Perdana Menteri India hingga sekarang. Sehingga, memudahkan penulis untuk mencari data- data terkait kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit. Selain itu, penulis juga melihat bahwa kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit ini terjadi diseluruh wilayah bagian India yang di dalamnya terdapat masyarakat dari kelompok Dalit seperti Hatras, Uttar Pradesh. Sekitar 80% masyarakat Dalit berdomisili di wilayah pedesaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Balasubramanian Thirugnamnam menuliskan dalam jurnal yang berjudul *Violence Against Woman's in India*, bahwa Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran berat hak asasi perempuan yang menjadi isu utama perdebatan. Pelanggaran hak-hak dasar pada perempuan melalui kekerasan fisik, mental, emosional, dan seksual terhadap perempuan hampir

menjadi hal yang lumrah dalam konteks India. Di India kekerasan umum terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga, perbudakan dalam bentuk pekerja rumah tangga, dan eksploitasi secara paksa (Thirugnanam 2020, 876-879). Dalam tulisan ini menjelaskan isu- isu kekerasan yang dihadapi oleh perempuan India secara umum. Sehingga, penulis merasa harus fokus membahas perempuan India bagian Dalit.

Selanjutnya dalam tulisan *The Situation of Dalit Rural Woman* yang ditulis oleh Navsarjan dan Fedo. Dalam tulisan ini juga menjelaskan terkait perempuan Dalit yang mengalami kekerasan berbasis gender dan kasta. Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan telah mencatat bahwa “Perempuan Dalit menghadapi kekerasan yang ditargetkan, bahkan pemerkosaan dan pembunuhan, oleh aktor negara dan anggota kuat dari kasta dominan yang digunakan untuk memberikan pelajaran politik dan menghancurkan perbedaan pendapat dalam masyarakat.” Ketidaksetaraan gender yang disucikan oleh norma-norma agama dan budaya mensubordinasi perempuan dan memperkuat tatanan patriarki, memungkinkan kekerasan terhadap mereka dilakukan di dalam rumah dan komunitas Dalit sendiri juga (Fedo 2013, 2-9). Tulisan ini sama seperti tulisan sebelumnya yaitu membahas isu kekerasan terhadap perempuan Dalit. Sehingga penulis merasa perlunya ada pengelompokan dari kekerasan yaitu kekerasan kultural yang dialami oleh perempuan Dalit.

Kemudian dalam tulisan yang ditulis oleh Singh dan Vashistha berjudul *A Critical Insight on Status of Dalit Women in India*. Di mana dalam tulisan ini menjelaskan bahwa di India kasta menentukan status sosial seseorang. Salah

satunya adalah kelompok Dalit atau dikenal sebagai kelompok yang tidak tersentuh sehingga paling tertindas dan tereksplorasi di India. Meskipun konstitusi India telah menetapkan beberapa kebijakan untuk melindungi kelompok Dalit tetap saja tidak mendapatkan perlakuan yang baik, terutama para perempuan Dalit. Hal ini karena hubungan sosial yang hierarkis sudah mengakar dalam masyarakat India. Sehingga perempuan Dalit harus menanggung tiga beban yaitu kasta, gender dan kemiskinan. Perempuan Dalit dipaksa bekerja pada usia dini untuk menafkahi keluarga mereka (Vashista 2018, 337-342). Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa perempuan Dalit menghadapi penderitaan bukan hanya karena kasta. Namun, perempuan Dalit juga menanggung beban gender dan kemiskinan. Sehingga, penulis merasa perlunya menjelaskan kekerasan kultural seperti apa yang dihadapi perempuan Dalit di India.

Pada jurnal yang ditulis Dahiya dengan judul *Torture on Dalit Women in India*, dalam jurnal ini membahas aspek-aspek penyiksaan yang menjadi ciri dari kehidupan perempuan Dalit di India. Namun, tulisan ini lebih lanjut memberikan penjelasan terkait undang-undang yang menentang diskriminasi terhadap perempuan Dalit dan efektivitas undang-undang dalam mengungkap pola impunitas (Dahiya 2021) . Sehingga berdasarkan jurnal tersebut penulis merasa perlu adanya pengelompokan dari aspek-aspek penyiksaan yang dihadapi perempuan Dalit tersebut menjadi bagian dari kekerasan kultural.

Selanjutnya dalam tulisan yang berjudul *Modifying India: Nationalism, Sexual Violence and the Politics of Hindutva*, tulisan yang ditulis oleh Varma, dalam tulisan ini Varma berpendapat bahwa kemenangan Modi meningkatkan

kekhawatiran bahwa negara India akan berubah menjadi demokrasi mayoritas daripada demokrasi liberal. Di mana, pada masa kekuasaan Modi, tidak dapat dihindari mayoritas suara berasal dari masyarakat beragama hindu dan beraliansi dengan Nasionalis Hindu. Sehingga ideologi demokrasi mulai bergeser menjadi Nasionalis Hindu. Nasionalis Hindu pada pemerintahan Modi ini akan menjadikan eskstensi sistem kasta semakin kuat. Hal ini tentu saja berdampak bagi kasta Dalit sebagai kasta yang rendah (Varma 2017, 57-83). Dalam tulisan ini fokus pada kekhawatiran masyarakat dari kasta rendah yaitu Dalit akan kekuasaan Modi. Sehingga, penulis merasa perlu dibahas terkait kekhawatiran seperti apa yang akan dihadapi masyarakat Dalit khususnya bagi para perempuan Dalit di India.

Melihat dari penjelasan tinjauan pustaka di atas yang lebih berfokus pada isu-isu kekerasan yang dialami oleh perempuan Dalit di India secara luas. Sehingga penulis lebih berfokus pada bagaimana kekerasan khususnya pada kekerasan kultural atau kekerasan yang tidak terlihat dapat terjadi pada perempuan Dalit di India secara terus menerus hingga sekarang. Dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya terkait kekerasan.

1.6 Kerangka Pemikiran

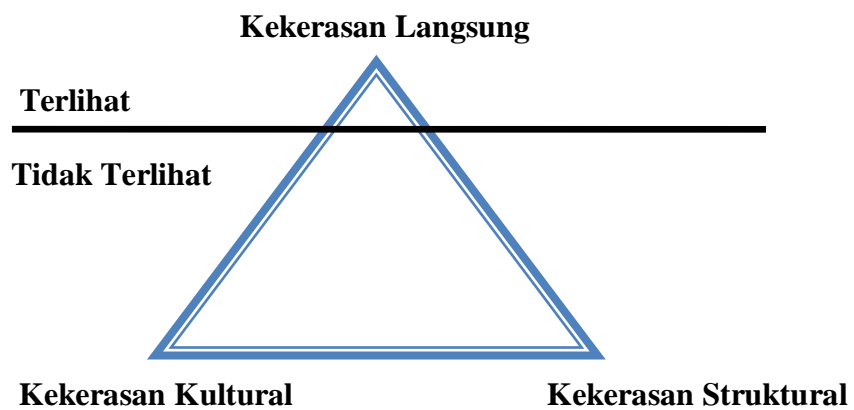
Kekerasan Kultural

Dalam sebuah penelitian diperlukannya teori, konsep atau kerangka pemikiran untuk menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran kekerasan

kultural yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Dalam hal ini, Galtung membagi kekerasan menjadi tiga bentuk yang dikenal dengan segitiga kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

Galtung menggambarkan ketiga kekerasan ini sebagai sebuah bentuk segitiga dalam tingkat kekerasan sebagai berikut:

Gambar 1: Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 294).

Dalam tulisan Galtung mengenai kekerasan kultural yang berjudul *cultural violence* (1990), budaya atau kultural dalam hal ini bukan terkait entitas dan budaya secara keseluruhan, melainkan terdapat aspek-aspek dalam budaya. Aspek simbolis dalam masyarakat yang dapat memicu terjadinya kekerasan kultural adalah agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris, ilmu formal dan kosmologi. Aspek ini dapat melegitimasi kekerasan struktural dan langsung (Galtung 1990, 291).

Pada gambar segitiga kekerasan di atas menjelaskan bahwasanya kekerasan kultural dan struktural dikategorikan sebagai kekerasan

yang tidak terlihat. Sedangkan kekerasan langsung terlihat. Berdasarkan sifat kekerasan kultural tersebut, pada akhirnya dapat menjadi pendorong terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan struktural ketika kekerasan kultural terus berkembang dalam masyarakat.

Galtung menjelaskan bahwa dalam kekerasan kultural terdapat beberapa aspek yaitu agama, di mana ajaran agama dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan kultural. Kemudian ada ideologi, yang mana ideologi dapat mempengaruhi pandangan manusia. Ideologi dalam sebuah negara dipengaruhi mayoritas ajaran agama yang dianut di negara tersebut (Galtung 1990, 296-299).

Selanjutnya, ada bahasa yang di mana bahasa dapat digunakan untuk mendiskriminasi dan berprasangka terhadap kelompok tertentu dalam bentuk ucapan. Lalu, ada seni yang dimana seni dapat menjadi pemicu kekerasan ketika suatu karya menggambarkan suatu kelompok secara negatif. Selanjutnya ilmu pengetahuan empiris aspek kekerasan kultural yang disebabkan berdasarkan doktrin ekonomi dan ilmu formal berdasar pada menarik kesimpulan secara logis. Dalam menarik kesimpulan yang logis yang dimaksud adalah seseorang dapat salah ketika menyimpulkan sesuatu, karena dalam suatu persamaan tidak selamanya akan berakhir sama. Dan yang terakhir ada kosmologi yang memandang dan menentukan bahwasanya sesuatu terjadi secara normal dan alami (Galtung 1990, 296-301).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat menjelaskan bagaimana kekerasan yang terjadi pada perempuan Dalit di India itu bisa terjadi. Untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan kultural dapat

terjadi pada perempuan Dalit di India. Penulis mengambil beberapa aspek yang sesuai dengan penjelasan Galtung yang menyatakan bahwa budaya dalam lingkungan masyarakat dapat membenarkan terjadinya kekerasan langsung dan struktural pada perempuan Dalit. Aspek tersebut adalah agama, ideologi, bahasa, ilmu empiris dan kosmologi.

Beberapa aspek tersebut dapat menjawab bentuk dari kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit. Pada kasus sistem kasta di India merupakan bagian dari doktrin agama yang membagi masyarakat atas dasar kelas-kelas. Di mana, status perempuan menjadi rendah dengan datangnya buku kitab agama Hindu. Seperti Manusmriti yang membagi manusia ke dalam sistem kasta laki-laki dan perempuan ke dalam sistem kelas yang berbeda. Manusmriti menyebutkan bahwa perempuan seharusnya tidak memiliki hak atas kekayaan, pendidikan, dan harta benda. Mereka seharusnya juga tidak memiliki kebebasan dan kemandirian. Orang kasta atas dapat melakukan pelecehan seksual terhadap orang kasta bawah. Membunuh wanita Dalit oleh Brahmana juga diizinkan (Hossain, 81).

Kemudian, aspek ideologi bisa menjelaskan kekerasan kultural pada perempuan Dalit. Ideologi India yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit. Di mana, ideologi India pada era pemerintahan Modi dibawah naungan Bharatiya Janata Party (BJP) yang beraliran hindu. Sehingga keberadaan demokrasi mulai bergeser menjadi Hindu Nasionalis. Sistem kasta semakin kuat sehingga sangat berdampak terhadap perempuan Dalit yang berasal dari kasta rendah. Pada aspek bahasa, perempuan Dalit tidak diperbolehkan belajar dan berbicara menggunakan bahasa

sanskerta. Hal ini dikarenakan bahasa sanskerta milik eksklusif pendidikan Brahmana dan kitab veda ditulis dalam bahasa sanskerta. Kemudian, aspek kosmologi yang membenarkan dan menormalisasikan sesuatu terjadi secara alami yaitu anggapan yang sudah turun temurun bahwa perempuan Dalit hanya dianggap sebagai subjek seksual bagi kaum laki- laki dan bahwasanya perempuan Dalit harus setia dan cukup melakukan pekerjaan di rumah saja. Aspek ilmu pengetahuan empiris, ilmu formal, dan seni sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ditemukan data yang relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis studi kasus ini.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, argumen sementara dari rumusan masalah bagaimana bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India pada penelitian ini adalah terdapat aspek- aspek yang memicu terjadinya kekerasan kultural berdasarkan yang dicetuskan oleh Galtung, pada perempuan Dalit yaitu aspek agama, di mana doktrin atau ajaran agama hindu yang sangat erat kaitannya dengan sistem kasta. Kemudian, perempuan Dalit dari segi aspek ideologi, dimana mayoritas masyarakat India menganut agama Hindu. Sehingga, dimasa pemerintahan Modi demokrasi mulai bergeser menjadi Hindu Nasionalis. Hal ini, semakin menguatkan eksistensi sistem kasta, sehingga Perempuan yang berasal dari kasta Dalit semakin termarginalkan. Selanjutnya pada aspek ilmu empiris dilakukan strelisasi rahim bagi perempuan Dalit. Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan Modi yang menganggap bahwa keturunan dari perempuan

miskin seperti Dalit hanya akan menghambat perkembangan ekonomi di India. Kemudian, pada aspek kosmologi bahwa perempuan Dalit secara turun-temurun dianggap sebagai objek seksual bagi laki- laki baik bagi kaum kasta atas dan kasta Dalit sendiri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode atau cara yang digunakan untuk menjawab atau mengeksplorasi suatu masalah. Kemudian metode kualitatif sebagai metode yang sistematis, terstruktur dan intuitif sehingga menghasilkan penelitian yang efisien dan koheren (Bakry 2015)

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Perempuan Dalit India. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kekerasan kultural pada era pemerintahan Modi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pilih adalah studi literatur. Di mana studi literatur berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, berita serta data-data yang dikeluarkan oleh badan-badan yang meneliti hal yang terkait dengan kekerasan perempuan Dalit di India. Kemudian, berbagai sumber tersebut dielaborasi untuk mendukung analisis penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini terdiri dari beberapa proses di mana proses yang pertama dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan data, selanjutnya

merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, tujuan, rancangan penelitian, analisis dan melaporkan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun seluruh uraian dan pembahasan pada skripsi ini maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan juga metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan proses penelitian.

Pada bab dua, membahas Perempuan Dalit dalam sejarah India dan Pada Era pemerintahan Modi yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas Posisi Perempuan Dalit dalam Sejarah India. Sub bab kedua membahas Posisi Perempuan Dalit pada Masa Pemerintahan Modi.

Pada bab tiga, menjelaskan Bentuk-bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India. Terdiri dari 5 sub bab yaitu:

1. Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama
2. Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi
3. Kekerasan Kultural dalam Aspek Bahasa
4. Kekerasan Kultural dalam Aspek Ilmu Empiris
5. Kekerasan Kultural dalam Aspek Kosmologi

Pada bab empat, berisi kesimpulan yang mencakup inti dari analisis yang telah dilakukan penulis.

BAB II

POSISI PEREMPUAN DALIT DALAM SEJARAH INDIA DAN PADA MASA PEMERINTAHAN MODI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana posisi perempuan Dalit sebelum pemerintahan Modi dan pada masa pemerintahan Modi. Hal ini untuk melihat bagaimana hal-hal yang dialami perempuan Dalit pra dan pada era Modi hingga terjadinya kekerasan kultural. Kasta Dalit adalah orang buangan yang berada di luar sistem empat kasta tradisional yang terdiri dari Brahmana turun-temurun, kelas Ksatria, Waisya, dan Sudra; Dalit dianggap tidak murni dan mencemari. Hal inilah yang menyebabkan Dalit secara fisik dan secara sosial dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat lainnya (Haseena 2015, 1-2).

2.1 Perempuan Dalit Pra Pemerintahan Modi

Sistem kasta masuk ke masyarakat India bersama para Brahmana. Pada India kuno (3200-2500 SM), dalam sistem kasta tidak ada perempuan yang status secara sosial tinggi, mereka belajar, dan cerdas. Perempuan bisa memilih pasangan hidup dan juga pernikahan janda muda diperbolehkan. Status perempuan menjadi rendah dengan datangnya kitab-kitab agama Hindu seperti *Manusmriti* yang membagi manusia ke dalam sistem kasta laki-laki dan perempuan ke dalam sistem kelas yang berbeda (Hossain, 81-82). Menurut *Manusmriti*, perempuan tidak berhak atas pendidikan, kemerdekaan, atau kekayaan. Ia tidak hanya membenarkan perlakuan terhadap perempuan

dalit sebagai objek seks dan mendorong perkawinan anak, tetapi juga membenarkan sejumlah kekejaman dengan kekerasan terhadap perempuan (Tamil Nadu Woman Forum 2007, 1-2).

Dalit merupakan kasta yang dirugikan, terlebih lagi terlahir menjadi perempuan Dalit menjadi hal yang sangat menyedihkan. Di mana perempuan Dalit tunduk pada sistem patriarki. Norma yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dari laki-laki pada setiap tingkat kasta dan hierarki kelas. Di bawah sistem kasta, perempuan Dalit terus terlibat dalam pekerjaan pertanian, buruh, atau pekerjaan tradisional lainnya. Mereka juga memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kemudian dijadikan aset pelecehan verbal, kekerasan fisik, pelecehan seksual, pembunuhan, dan pemerkosaan. Hal ini merupakan ancaman bagi perempuan Dalit dan sebagai alat untuk melanggengkan eksploitasi dan kontrol terhadap kelompok Dalit (Satyendra Kumar 2010, 27-28).

Status tercela, tidak tersentuh dan tidak murni telah membebani penduduk Dalit selama bertahun-tahun dan perilaku seperti itu telah mengakibatkan meluasnya intoleransi terhadap perempuan Dalit yang tak tersentuh. Di mana perempuan Dalit hidup dalam ketegangan sepanjang masa dan permanen. Perempuan Dalit dilarang memasuki tempat ibadah umum di desa-desa. Perempuan Dalit tidak diizinkan mengakses tempat-tempat berair, lembaga amal publik, atau jalan setapak dan jalan yang digunakan oleh orang-orang dari kasta atas. Perempuan Dalit dibatasi dalam hal penggunaan perhiasan dan tidak diperbolehkan masuk ke rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pekerjaan umum. Mereka menderita diskriminasi dan prasangka di tempat-

tempat umum dan lembaga-lembaga serta diharapkan melakukan pekerjaan berstatus rendah seperti mengais-ngais (Kamen 2004, hal. 12-14).

Masyarakat India merupakan masyarakat hierarki yang dibagi berdasarkan sistem kasta. Bahasa yang digunakan oleh kasta Dalit tentu saja berbeda dengan bahasa yang digunakan kasta atas. Di mana dalam beberapa bahasa yang sama, namun pengucapannya dengan cara yang berbeda. Masyarakat Dalit dilarang belajar dan berbicara bahasa Sansekerta. Perempuan Dalit dilarang berbicara menggunakan bahasa Sansekerta, mereka hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Prakerta. Hal ini dikarenakan bahasa Sansekerta sebagai milik eksklusif pendidikan Brahmana dan kitab suci ditulis dalam bahasa Sansekerta (Kaushalya 2015, 100-104).

Sehingga ini menjadi alasan pada masa India Kuno perempuan Dalit tidak berhak mempelajari Veda. Itulah mengapa Sanskara dilakukan tanpa Mantra Veda. Perempuan Dalit tidak memiliki pengetahuan tentang agama karena tidak memiliki hak untuk mengetahui Veda. Pengucapan Mantra Veda berguna untuk menghapus dosa. Karena perempuan Dalit tidak dapat mengucapkan Mantra Veda, mereka sama najisnya dengan ketidakbenaran. Bahkan pembunuhan seorang perempuan Dalit secara eksplisit dibenarkan sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana, yang di mana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada binatang (Tamil Nadu Woman Forum 2007, 3).

Diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan tidak kurang dalam masyarakat India. Dengan menjadikan perempuan hanya sebagai objek kecantikan, mereka telah ditolak peran sebagai manusia intelektual. Ini sangat

jelas disebutkan dalam Veda. Aturan yang menurutnya perempuan harus berperilaku telah dirumuskan oleh masyarakat patriarki. Ada banyak diskusi dalam literatur Sansekerta tentang tugas seorang wanita. Aliran Yajñawalkya dan Mitaksar bab 77 menyatakan bahwa itu kewajiban seorang wanita untuk mengikuti perintah suaminya, dan di sinilah letak keselamatannya. Bahkan jika apa yang dikatakan suaminya adalah tidak bermoral istri harus mengikuti kata-katanya tanpa ragu-ragu (Kaushalya 2015, 102).

Selanjutnya, dalam sumber hukum Hindu aliran Mitaksar bab 84 dinyatakan bahwa :

“Seorang wanita, yang suaminya jauh dari rumah, tidak boleh menghibur, tidak boleh membuat dirinya cantik, tidak boleh merayakan hari raya dan tidak boleh keluar rumah.”

Ini menyiratkan bahwa seorang pria diizinkan untuk melakukan apa pun yang dia inginkan. Dia bahkan bisa menghibur dirinya sendiri dengan wanita lain ketika dia jauh dari rumah, tetapi seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk tersenyum dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman di suami ketiadaan. Aliran Yajñawalkya termaktub dalam Miktasar bab 86 juga menyatakan bahwa seorang pria harus menikah lagi segera setelah kematian istrinya, tanpa melakukan penundaan dengan alasan apapun. Selain itu dikatakan juga dalam Manusmriti bahwa seorang perempuan harus berada di bawah perwalian ayah sebelum menikah, suami setelah perkawinan dan anak di masa tua (Kaushalya 2015).

Perempuan Dalit tertindas ganda, dari satu sisi dia menghadapi penindasan sebagai seorang Dalit dan di sisi lain menjadi seorang wanita. Seorang wanita Dalit bekerja sebanyak pria. Tetapi setelah kembali dari pekerjaan, seorang pria beristirahat, sedangkan perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak dan melayani suami. Perempuan Dalit juga mengalami hubungan seksual pelecehan dari orang-orang dari kasta atas (Wessler 2019, 162-165).

Masyarakat di India masih kental dengan norma dan diskriminasi kasta, yang menyebabkan sejumlah paradoks dan kontradiksi. Hingga memasuki abad kedua puluh satu persoalan normalisasi kasta dan ketidakmanusiaan serta ketidakadilan yang dilanggengkan oleh sistem kasta kuno. Jika ada Dalit menyentuh atau menikahi anggota kasta atas, maka akan dipisahkan secara paksa. Banyak perempuan buruh tani dari kasta rendah yaitu Dalit secara rutin diperkosa atau dieksploitasi secara seksual. Upah mereka juga tidak dibayar penuh. Bahkan dalam Skema Pengembangan Anak Terpadu yang dijalankan pemerintah, sebagian besar pejabat pemerintah kasta atas menolak untuk menyentuh makanan yang disiapkan oleh seorang wanita Dalit di *anganvadi* atau tinggal di rumahnya. Studi ini mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan Dalit sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lemah, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak mereka. Kemiskinan yang ekstrem memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh tani di ladang milik kasta atas, sementara kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang menyebabkan perempuan Dalit selalu mentoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi pada mereka (Society n.d.).

Menurut Komisi Nasional SC dan ST 2000, sekitar 75% perempuan Dalit putus sekolah. Meskipun banyak lembaga yang menawarkan banyak program khusus untuk perempuan Dalit faktanya partisipasi perempuan Dalit dalam pendidikan rendah. Pernikahan dini, tekanan sosial, kebutuhan untuk bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, kebutuhan untuk membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, infrastruktur yang buruk, berhenti sekolah setelah menikah. Semua alasan ini bertanggung jawab atas rendahnya tingkat melek huruf. Tingkat melek huruf untuk perempuan Dalit 10.93% dan 75% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan (Sarvesh, 2021, 96) .

Meskipun sudah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalit terlibat dalam mendirikan sekolah, beasiswa, dan asupan dasar untuk Dalit pada bagian pedesaan India. LSM seperti Ambedkar Center for Peace and Justice dan Kampanye Nasional Hak Asasi Manusia Dalit terlibat dalam membawa penderitaan orang-orang Dalit sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional dan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk memberikan hak kepada Dalit sebagai warga negara penuh dari masyarakat dan menghilangkan diskriminasi berbasis kasta (Mahey n.d.).

Selama tahun 1970, terdapat gerakan Dalit Panther di Maharashtra di India berakar untuk memperjuangkan penyebab dalit dalam kegiatan kreatif. Itu meminjamnya dukungan moril dari tulisan Dr. B.R.Ambedkar, yang percaya bahwa akar penyebab *untouchability* terletak pada budaya atau ras yang jelas perbedaan penghinaan dan kebencian ditambah dengan

ketergantungan ekonomi yang erat dari masyarakat yang lebih rendah pada yang unggul ((Kumar 2017, 83).

Masalah yang dihadapi perempuan Dalit tidak hanya gender dan tingkat ekonomi tetapi juga diskriminasi yang terkait dengan agama, kasta, dan pengasingan, yang mengakibatkan penolakan sosial, ekonomi, budaya, dan hak politik. Perempuan Dalit menjadi rentan mendapat kekerasan dan eksploitasi seksual karena gender dan kasta. Perempuan dalit juga menjadi korban praktik sosial dan keagamaan yang menjijikkan seperti *devadasi/jogini* (pelacuran di kuil), hal ini merupakan bentuk eksploitasi seksual atas nama agama. Di mana perempuan Dalit dipaksa masuk ke prostitusi yang ditutupi atas dasar praktik keagamaan. Di beberapa bagian India sistem Devadasi masih dilaksanakan. Sistem Devadasi diperkenalkan oleh kasta yang lebih tinggi dari India. Devadasi pada dasarnya adalah pelacuran kuil. Sekitar 50,000 anak perempuan dijual setiap tahun untuk organisasi kuil untuk melibatkan dalam sistem Devadasi. Perempuan terlibat dalam pelayanan di kuil dan terlibat ke layanan seksual juga. Sistem Devadasi diizinkan dalam Kitab Suci Hindu (Hossain, 82).

2.2 Perempuan Dalit pada Masa Pemerintahan Modi

Narendra Modi sudah mempunyai banyak pengalaman terkait politik India, dimana pada tahun 2001 Modi menjabat sebagai menteri utama Gujarat. Kemudian, pada tahun 2014 pemilu dimenangkan pemerintahan yang didominasi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) dan dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi mulai berkuasa di India. Didukung oleh hubungannya dengan gerakan Nasionalis Hindu yang lebih luas, BJP berhasil mendapatkan

mayoritas majelis rendah parlemen India di Lok Sabha. Kemenangan Modi meningkatkan kekhawatiran bahwa India akan berubah menjadi demokrasi mayoritas daripada demokrasi liberal. Di mana, pada masa kekuasaan Modi, tidak dapat dihindari mayoritas suara berasal dari masyarakat beragama hindu dan beraliansi dengan Nasionalis Hindu. Sehingga ideologi demokrasi mulai bergeser menjadi Nasionalis Hindu (Varma 2017, 60-65).

Dalam Partai Bharatiya Janata (BJP) terdapat sebuah ideologi yang dikenal dengan Hindutva. Di mana Hindutva ini pertama kali diusulkan oleh Vinayak Damodar Savarkar sebagai ide politik pada tahun 1928 dalam sebuah pamflet yang berjudul "Hindutva: Who is a Hindu?".

"Hinduisme memiliki banyak teks termasuk Veda, Purana, sementara Hindutva memiliki satu pamflet politik utama," tulis anggota parlemen Kongres Shashi Tharoor dalam sebuah postingan media sosial pada tahun 2019. Kemudian,

Pada masa pemerintahan Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP) mempromosikan dirinya sebagai partai yang berkomitmen pada keadilan sosial dan telah menyoroiti bahwa tidak ada pemerintah lain yang menghormati Ambedkar lebih dari rezim Perdana Menteri Narendra Modi. Rezim ini juga yang menyebut dirinya sebagai 'Bhakt Ambedkar. Di tahun 2017 Ramnath Kovind dipilih sebagai Presiden India. Pemilihan ini digunakan oleh BJP untuk menunjukkan bahwa partai tersebut tertarik untuk memasukkan Dalit ke dalam agenda politiknya. Bersamaan dengan itu, BJP juga menunjukkan pentingnya para pemimpin Dalit seperti Ramvilas Paswan dan Ramdas Athawale dalam menjalankan pemerintahan. Representasi kasta Dalit yang berpengaruh dan pengakuan

atas simbol-simbol sosialnya telah menjadi keharusan dalam rekayasa sosial baru BJP. Strategi inklusi semacam itu pasti telah membantu BJP meningkatkan citra konvensionalnya yang anti terhadap Dalit. Ia telah mengimprovisasi citra partai 'Brahmin-Bania' yang konservatif dengan menawarkan karakter politik liberal kepada partai tersebut (Wankhede 2018).

Meningkatnya penerimaan Hindutva di kalangan Dalit sangat mengecewakan, mengingat keyakinan ideologi ini pada supremasi kasta atas. Penaklukan Dalit tercermin dalam tindakan dan kelambanan pemerintah BJP. Penundaan pencairan bantuan keuangan oleh pemerintah telah memaksa banyak siswa Dalit putus sekolah dan perguruan tinggi. Banyak korban kekejaman Dalit khususnya kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit tidak dapat mendaftarkan First Information Report (FIR) pada polisi (Anggarwal 2022). Masyarakat kasta Dalit tidak berani melaporkan tindak kekerasan kepada polisi. Karena mereka takut ancaman pembalasan dari kelompok kasta atas, intimidasi dari kepolisian. Di mana pihak kepolisian juga menyalahgunakan wewenang dan telah melakukan kesepakatan dengan kasta kelas atas (CNN 2014).

Dalam kacamata Sarvakar mengenai Hindutva sebagai ideologi politik. Hindutva memandang Dalit sebagai masyarakat yang harus tetap dirangkul karena masih mempraktikkan agama Hindu dan bisa menyatukan Hindu untuk menghadapi Islam yang dianggap sebagai ancaman di India. Di masa pemerintahan Modi, suara dari kaum minoritas seperti Dalit sangat berarti. Namun, disisi lain Dalit tetap dianggap kelompok rendah sebagai konsekuensi

kehidupan mereka sebelumnya. Di mana orang-orang dari kelompok Dalit harus melakukan penyucian di kehidupan saat ini (CNN 2014).

Selanjutnya, pandangan tentang ketidaksetaraan gender tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat presentasi diri dan kejenuhan wacana publik, dengan sering digunakan citra maskulin dan seksual secara langsung menyebabkan ketidaksetaraan gender dipengaruhi juga pada tingkat hukum dan konstitusi. Ciri utama dari politik seksual pada era Modi, konsekuensi politik serta konsolidasi hak Hindu merupakan pengulangan Manushmriti yakni teks hukum Sansekerta kuno yang sangat konservatif dan patriarki dari hukum Hindu dan sudah digunakan sejak masa kolonial Inggris untuk membentuk dasar hukum Hindu. Sehingga kekerasan seksual telah membentuk kehidupan publik dan pribadi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mencakup penataan kembali secara radikal ruang publik dan pribadi serta produksi negara yang maskulin serta berusaha membentuk kembali tradisi dan modernitas dalam kerangka Hindutva (Varma 2017, 57-83).

Pada era pemerintahan Modi semua kebijakan, hukum, maupun kebiasaan masyarakat India tentu saja dibentuk atas dasar mayoritas yaitu Hindu. Sehingga Nasionalis Hindu pada pemerintahan Modi menjadikan eskstensi sistem kasta semakin kuat. Modi menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan Dalit sudah terjadi selama berabad- abad sehingga harus dihentikan dan sistem kasta harus dihapuskan. Namun, pernyataan tersebut hanya sebatas ucapan belaka. Hal ini dapat dilihat dari Modi merekrut menteri-menteri yaitu berasal dari mayoritas yang beragama Hindu bahkan Hindu yang ekstrim (Kandasamy 2019).

Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan Dalit bukan untuk pertama kalinya. Namun, pada masa kepemimpinan BJP yang dikuasai Modi pada tahun 2014 meningkat sangat signifikan. Di mana pada tahun 2018 kejahatan terhadap perempuan Dalit meningkat sebanyak 27,3%. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan klaim dari pemerintahan BJP yang menyatakan bahwa pemerintahan dan politik pada masa pemerintahan BJP ini pro hindu dan pro miskin. Dibalik meningkatnya kekerasan berbasis kasta mencerminkan BJP pada kekuasaan Modi mendorong dan mempromosikan Brahmanisme dengan mengorbankan orang-orang Hindu yang bukan berasal dari kasta elit (Puniyani 2021).

Kebijakan dan strategi Brahmanis ini sangat berdampak pada kaum Dalit khususnya perempuan Dalit. Di mana strategi ini tentu saja akan menghalalkan pembunuhan seorang perempuan Dalit. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dibenarkan bahwa membunuh perempuan Dalit sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada binatang (Forum 2007, 1-16).

Pemilihan umum Mei 2014 adalah momen penting bagi India pasca-kolonial, karena menyaksikan kemenangan telak partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang juga dikenal sebagai Partai Rakyat India. Sorotan lain dari putusan elektoral ini adalah bahwa satu partai bisa mendapatkan mayoritas kursi yang jelas, memenangkan 282 dari kemungkinan 543 kursi di Parlemen setelah tiga puluh tahun. Meskipun partai tersebut menikmati mayoritas di majelis rendah, ia telah membentuk pemerintahan koalisi yang menghormati pemahaman pemilu pra-pemilu dengan partai lain. Pemerintah

koalisi ini mencakup beberapa afiliasi Hindutva yang mendukung Hinduisme politik militan dan supremasi Hindu, sementara partai koalisi lainnya menyerukan regionalisme (Ansari 2016, 4-6).

Kemenangan BJP yang dipimpin oleh Narendra Modi ini menjadikan India negara yang demokrasi dan republik sekuler berpindah haluan menjadi nasionalis Hindu. Sistem kasta juga mengesahkan poin bahwa agenda nasionalisme Hindu bukanlah tentang pembentukan kolektif Hindu dengan membebaskan orang-orang dari kasta yang lebih rendah dari sistem kasta yang menindas selama berabad-abad. Namun, sebaliknya nasionalis Hindu berusaha untuk mengakar hegemoni kasta atas (Ansari 2016, 16-17).

Pada musim dingin 2016 hingga 2017, berita-berita terkait sterilisasi kepada perempuan beredar dalam rangka pengendalian populasi yang melambangkan kekuatan yang menargetkan tubuh. Lebih khusus lagi rahim perempuan miskin, Dalit, Adivasi dan agama minoritas di India sebagai situs intervensi kekerasan. Pemerintahan Modi menganggap ledakan penduduk sangat berdampak pada pembangunan ekonomi (Wilson 2018, 90-92). Giriraj Singh yang merupakan Menteri Persatuan menyatakan bahwasanya dalam pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi, nyaris tidak menyembunyikan keterkaitan pemerintahan Modi dalam wacana supremasi Hindu yang semakin dominan.

Perempuan Dalit juga menjadi korban dari kebiasaan sosial dan praktik keagamaan dalam masyarakat Hindu. Kebiasaan tersebut, salah satunya adalah devadasi (pelacuran kuil). Di mana gadis-gadis Dalit dinikahkan orang tuanya dengan dewa desa. Kemudian, gadis-gadis ini dieksploitasi secara seksual oleh

tuan tanah kasta atas dan orang-orang kaya yang ada di desa tersebut. Hal ini sudah berlangsung sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan. Sistem devadasi ini masih terjadi hingga periode pemerintahan Modi. Perempuan Dalit di India hidup dalam masyarakat yang patriarki dan terbagi dalam garis kasta (Shingal 2015, 107).

Lahir menjadi Dalit dan perempuan menjadikan mereka sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan. Ada tiga alasan keagamaan yang membuat lembaga ini terus berkembang. Pertama, banyak yang melanggengkan sistem devadasi yang percaya bahwa semakin muda seorang gadis berbakti, semakin banyak Tuhan yang akan memberkati dia dan keluarganya. Mengingat bahwa devadasi biasanya hanya diambil dari kasta terendah, banyak wanita yang diturunkan dari kasta bawah. Dewi percaya bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menjalani kehidupan yang diberkati adalah menikahi dewa secara langsung. Kedua, banyak gadis yang rela masuk, atau dipaksa masuk, sistem devadasi melihatnya sebagai satu-satunya cara mereka untuk bangkit di India. sistem kasta yang kaku. Sistem kasta tidak hanya menentukan hubungan antara dua orang, tetapi juga membatasi kemampuan satu orang untuk bergerak di atas kasta kelahirannya (Shingal 2015, 108).

Banyak keluarga mereka memandang menikahi dewa sebagai cara untuk naik dalam sistem kasta yang ketat. Pandangan ini tidak sepenuhnya tanpa dukungan karena banyak yang tidak menghormati praktik devadasi, dianggap sebagai keberuntungan dan bahkan disebut untuk pernikahan kasta atas untuk memberikan berkah. Ketiga, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan,

adalah bahwa banyak pendeta Hindu tampaknya secara aktif memaafkan praktik tersebut (Shingal 2015, 108-109).

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia India, ada kepercayaan umum bahwa mempersembahkan beberapa perempuan kepada dewa akan dihargai dengan berlimpah. Laporan tersebut menyatakan bahwa hal ketika individu pergi ke kuil dengan masalah seperti kesehatan yang buruk, kemiskinan, dll para imam sering menafsirkan masalah ini sebagai wraat dari dewa dan menyarankan bahwa mereka harus menawarkan salah satu putri untuk layanan dewa Mengingat bahwa manifestasi fisik Hindu. yaitu para pendeta sendiri yang melanggengkan sistem, tidak mengherankan bahwa sistem terus berlanjut (SrIdevi 2019, 108).

Berdasarkan laporan Equity Watch 2015 menunjukkan bahwa kejahatan resmi, kasus pemerkosaan terhadap perempuan Dalit telah meningkat lebih dari 47 persen sejak dekade sebelumnya (Note 2016, 2-6).

Kemudian, pada masa pemerintahan Modi masyarakat India masih melanggengkan teks hukum Hindu yang berbahasa Sansekerta yaitu *Manushmriti*. Dalam hal ini laki- laki dan perempuan dibedakan posisinya. Di mana menurut *Manusmriti*, perempuan tidak berhak atas pendidikan, kemerdekaan, atau kekayaan dan membenarkan perlakuan terhadap perempuan dalit sebagai objek seks. Hal ini didukung juga dengan masyarakat Dalit yang masih sangat patriarki dengan menempatkan perempuan di bawah laki-laki, di mana perempuan Dalit dibatasi dalam mengambil keputusan terkait rumah tangga, bahkan perempuan Dalit disiksa oleh pasangannya ketika tidak

melahirkan anak laki- laki dan dianggap tidak berbakti kepada pasangan (BBC.COM 2019).

Ajaran ini sudah berlangsung lama jauh sebelum pemerintahan Modi. Perempuan Dalit berpikir bahwasanya dengan terpilihnya Modi menjadi Perdana Menteri India, kehidupan akan menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya perempuan Dalit terus- terusan mendapat perlakuan tidak manusiawi. Bahwa perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Modi mengalami kekerasan yang dipengaruhi oleh ajaran teks hukum Hindu *Manushmriti* yang memposisikan perempuan sebagai objek seksual dan pembunuhan perempuan Dalit yang dilakukan Brahmana secara eksplisit dianggap hal yang ringan yang diartikan sama saja dengan membunuh binatang. Sehingga, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap perempuan Dalit terjadi setiap harinya rata- rata 10 perempuan (BBC.COM 2020).

Pemerintahan Modi diperkuat juga dengan masyarakat India yang konservatif. Terkhusus masyarakat Dalit yang sangat patriarki. Dimana masyarakat Dalit menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Sehingga, sistem kasta tradisional masih sangat melekat dan membudaya dalam masyarakat hingga pada masa pemerintahan Modi. Meskipun sudah berbagai hal telah dilakukan baik pada masa pemerintahan Modi dan sebelum pemerintahan Modi. Seperti pada masa pemerintahan Modi dibentuk kebijakan nol toleransi bagi pelaku kekerasan. Namun, hal tersebut hanya terlihat sebagai simbol karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kebijakan tersebut tidak menyelesaikan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan Dalit (Aryanti 2020).

Berdasarkan data analisis *National Crime Records Bureau* (NCRB) yang telah mencatat 251.068 insiden kejahatan yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan Dalit selama 6 tahun yaitu dari 2014 hingga 2019. Kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan Dalit mencapai 15,11%. Kejahatan ini telah meningkat hingga 46% , yang mana sebelumnya kejahatan terhadap perempuan Dalit berdasarkan data sebesar 29,33% (Report 2021). Berikut data analisis dari NCRB tahun 2014-2019 terkait jumlah dan persentase kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan Dalit:

Tabel 1: Tabel analisis NCRB terkait jumlah dan presentase kejahatan terhadap perempuan Dalit

Tahun	Total Kejahatan yang terdaftar dalam SC/ST (PoA) Act	Total Kejahatan terhadap Perempuan Dalit yang terdaftar di SC/ST (PoA)	Keseluruhan kejahatan terhadap Perempuan dan anak-anak Dalit yang tercatat dalam SC/ST (PoA) Act (%)
2014	40.300	5.149	12,77%
2015	38.564	5.713	14,81 %
2016	40.774	6.501	15,94%
2017	42.969	6.347	14,77%
2018	42.539	6.818	16,02%
2019	45.922	7.510	16,35%
Total	251,068	38,038	5,11%

Sumber: National Crime Report Bureau (Report 2021)

Perempuan dan anak perempuan Dalit adalah mangsa yang mudah bagi masyarakat yang pola pikirnya konservatif, Brahmanis, dan patriarki. Kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit merajalela seperti yang diberikan oleh polisi dan pemerintah setempat. Hal yang paling menyedihkan adalah anak- anak perempuan Dalit menjadi sasaran secara luas. Kemudian

perlindungan bagi para pelaku kekerasan banyak yang dipertimbangkan, yang mana kasta sangat berperan dalam kasus kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit. Kasta memiliki peran yang berbeda untuk dimainkan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit. Di mana tubuh perempuan Dalit lebih sering menjadi alat bagi komunitas kasta atas untuk menundukkan dan menindas kelompok Dalit. Pada laporan NCRB menyatakan bahwa pada tahun 2014 sampai 2019 bentuk kekerasan yang dialami perempuan Dalit berdasarkan kasta dan gender mencapai 81 kasus (Report 2021, 61).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan Dalit tersebut berupa pemerkosaan, pelecehan seksual dan penyerangan seksual. Hal ini merupakan ladang kekerasan paling umum yang dihadapi perempuan Dalit. Dari total 81 kasus tersebut mencapai 38,27% (31 insiden) terkait kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit. Kemudian pembunuhan terhadap perempuan Dalit dari 81 kasus, 10% (8 insiden) terkait kasus pembunuhan.

Dari 81 kasus tersebut berdasarkan laporan dari NCRB, penulis memberikan beberapa contoh kasus yang dihadapi oleh perempuan Dalit pada masa pemerintahan Modi, pada tahun 2019 tepatnya tanggal 13 Oktober perempuan Dalit dicap sebagai penyihir dan menuduh perempuan Dalit menggunakan ilmu hitam yang menyebabkan putri dari seorang tabib tradisional meninggal. Kemudian atas insiden ini anggota keluarga yang meninggal, memukuli perempuan Dalit secara brutal dan memaksanya untuk makan kotoran manusia (Report 2021, 63).

Selanjutnya, pada 13 Maret 2020 seorang perempuan Dalit diberhentikan oleh seorang pria dari kasta atas karena mengambil air dari keran pemerintah. Kemudian pria tersebut mempermalukan perempuan Dalit dengan menyebutnya sebagai orang yang tidak tersentuh dan menyatakan bahwa kelompok Dalit tidak diperbolehkan untuk menggunakan keran itu karena digunakan oleh kasta atas. Pria tersebut juga mengatakan bahwa sentuhan perempuan dari Dalit menyebabkan air menjadi tidak suci lagi. Namun, perempuan ini tetap mengabaikan hal tersebut dan terus mengisi air. Hal ini membuat marah pria tersebut kemudian mengajak pria lain dari kasta atas dan mereka menyerang perempuan Dalit tersebut dengan menjambak rambutnya dan mendorongnya agar pergi (Report 2021, 64).

Banyak pengamat sosial mengatakan bahwa meningkatnya kejahatan seksual dan kekejaman tidak dipicu oleh dinamika kasta saja. Ada beberapa faktor lain di balik tindakan tidak manusiawi ini, di sisi lain perempuan Dalit yang memiliki perlindungan sosial dan hukum paling sedikit, menjadi sasaran utama bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Kekerasan seksual yang terjadi semacam itu bukanlah hal baru, yang mengganggu adalah meningkatnya tindak kejahatan terhadap perempuan Dalit. Sebuah studi yang dicetuskan oleh Equality Now and Swabhiman Society, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan, menemukan bahwa perempuan Dalit menjadi sasaran bentuk kejahatan seksual yang lebih kejam, seperti pemerkosaan beramai-ramai atau pemerkosaan dengan pembunuhan (Deka 2020) .

Pada bab dua ini telah menjelaskan bentuk dan contoh kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan Dalit di India sebelum dan semasa periode

pemerintahan Modi. Di mana pihak perempuan Dalit banyak sekali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi serta perampasan hak-hak perempuan Dalit. Serta terdapat aturan yang dibentuk pada pemerintahan Modi menjadi bagian dari empat macam bentuk ancaman bagi kebutuhan dasar manusia berdasarkan pendapat Galtung bentuk ancaman tersebut, yakni kebutuhan akan kelangsungan hidup. Identitas, kesejahteraan, dan kebebasan (*freedom*).

BAB III

BENTUK- BENTUK KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DALIT DI INDIA PADA ERA PEMERINTAHAN MODI

Berbagai bentuk kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit India tidak terjadi begitu saja. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Penjelasan ini akan memberikan pemahaman bahwasanya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India sebagai siklus yang tidak akan berhenti dari setiap periode pemerintahan. Seperti yang telah dijelaskan Galtung dalam tulisannya bahwa kekerasan jenis ini seringkali tidak disadari oleh pihak yang melakukan ataupun pihak yang menjadi korban.

Pada bab dua penulis telah menjelaskan kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit di India pasca dan pra pemerintahan Modi. Lalu penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh perempuan Dalit pada era pemerintahan Modi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan langsung dan struktural. Dalam studi kasus ini, penulis melihat bahwa instrumen dari kekerasan kultural yakni agama, ideologi, bahasa, ilmu empiris dan kosmologi menjadi pendorong terjadinya kekerasan struktural yang kemudian berlanjut menyebabkan terjadinya kekerasan langsung yang dihadapi oleh perempuan Dalit di India.

3.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Agama

Galtung berpendapat dalam tulisannya yang berjudul *cultural violence* (1990), bahwa agama menjadi salah satu aspek dalam kekerasan kultural. Dalam hal ini, ajaran atau doktrin agama menurut Galtung dapat digunakan untuk hal yang benar atau salah. Analoginya terkait pernyataan tersebut, hal yang baik berasal dari tuhan sedangkan hal yang buruk berasal dari setan. Kemudian dari penjelasan Galtung juga dapat dipahami bahwasanya ketika ajaran agama diterapkan ke dalam hal yang salah maka hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan kultural (Galtung, 296).

Selanjutnya, dalam tulisan Galtung terdapat tabel yang menyatakan bahwa ada yang terpilih dan yang tidak terpilih. Berikut tabel terpilih dan tidak terpilih:

Tabel 2: Tabel terpilih dan tidak terpilih

Pilihan Tuhan	Bagian Setan	Konsekuensinya
Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Ekosida, Spesiesme
Laki-laki	Wanita	Seksisme, Pembakaran tukang sihir
Umatnya	Umat lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit putih	Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas atas	Kelas bawah	Eksplorasi, Klasisme
Kepercayaan yang benar	Aliran sesat/kafir	Inkuisisi

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 297).

Berdasarkan tabel di atas, yang terpilih berasal dari Tuhan dan yang tidak terpilih merupakan bagian dari setan, yang mana kedua hal ini memiliki

konsekuensi masing-masing. Adapun yang terpilih yakni manusia, laki-laki, umatnya, kulit putih, kelas atas dan orang yang beriman. Kemudian yang tidak terpilih yaitu hewan, tumbuhan, alam, wanita, umat lain, berwarna, kelas bawah, dan orang yang tidak beriman (kafir). Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya tindakan rasisme, klasisme, kolonialisme, seksisme, ekosida, diskriminasi kelas dan eksploitasi (Galtung 1990, 297). Selain itu, Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan kultural dapat melegitimasi terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Dalam kasus perempuan Dalit di India pada era pemerintahan Modi, kekerasan kultural dalam aspek agama terdapat sistem devadasi (pelacuran kuil) yang merupakan kebiasaan sosial dan praktik keagamaan dalam agama Hindu yang mana dalam sistem ini gadis-gadis Dalit dinikahkan dengan dewa desa. Sehingga dengan mudah untuk dieksploitasi secara seksual oleh tuan tanah dan orang kaya yang berada di sana. Di mana gadis-gadis Dalit di India ini diminta untuk memenuhi kebutuhan seksual secara paksa (Hossain, 82). Hal ini merupakan kekerasan secara langsung. Namun, berdasarkan penjelasan Galtung bahwa kekerasan kultural dapat melegitimasi terjadinya kekerasan langsung. Kemudian, Galtung menjelaskan bahwasanya doktrin agama yang diterapkan dalam hal yang salah (Galtung 1990, 296), maka sistem devadasi ini menjadi bagian dari kekerasan kultural pada aspek agama. Karena sistem devadasi sebagai praktik keagamaan dalam Hindu yang menyebabkan perempuan Dalit dieksploitasi secara seksual.

Selanjutnya, berdasarkan tabel terpilih dan tidak terpilih, masyarakat Dalit mendapatkan perlakuan yang tidak adil hanya karena berasal dari kasta rendah.

Terlebih lagi para perempuan dalit yang diperlakukan tidak manusiawi seperti diperkosa, dibunuh, dan dieksploitasi. Hal ini merupakan bagian dari kekerasan kultural pada aspek agama, sesuai dengan yang telah dijelaskan Galtung dalam tulisannya, bahwa orang-orang yang berasal dari kelas rendah bukan pilihan Tuhan, namun mereka bagian setan (Galtung 1990, 297). Sehingga, perlakuan yang dihadapi perempuan Dalit merupakan akibat dari status kasta yang rendah.

3.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideologi

Menurut Galtung dalam tulisannya yang berjudul *cultural violence* (1990, 298), bahwa aspek ideologi memberikan pengaruh yang besar atas dasar persepsi atau pandangan dari manusia. Di mana ideologi sebuah negara dapat dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama di negara tersebut. Galtung juga menjelaskan bahwa negara terkandang dipandang sebagai perpanjangan tangan tuhan yang maknanya bahwasanya negara dapat memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan.

Dalam tulisannya Galtung juga menjelaskan bahwa negara sebagai salah satu penerus Tuhan yang mewarisi hak untuk memusnahkan kehidupan serta mengontrol penciptaan kehidupan menggunakan otoritas yang lebih tinggi dari perempuan yang hamil. Dalam perang sekarang membunuh dilakukan atas nama bangsa. Di mana bangsa itu terdiri dari warga negara dengan berbagai etnis. Galtung memberikan contoh lain yaitu kehidupan yang pro aborsi, hal ini mungkin berakar atas keputusan kekuasaan negara atas kehidupan. Orang-orang yang pro akan hal ini akan cenderung pasifis, di mana mereka akan menentang hukuman mati dan marah atas tingginya kematian orang kulit hitam

di seluruh dunia. Prioritas untuk memilih aborsi atau kematian daripada hidup merupakan jenis dari kekerasan budaya, yang didasarkan pada penolakan kehidupan janin (Galtung 1990, 299)

Kekerasan kultural pada perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Modi dalam aspek ideologi berkaitan dengan kemenangan Modi pada pemilu 2014. Kemenangan ini tentu saja berdampak pada sistem pemerintahan di India. Di mana India yang sebelumnya merupakan negara demokrasi dan sekuler mulai bergeser menjadi negara nasionalis Hindu (Hindutva). Sehingga eksistensi kasta semakin kuat, hal ini menjadikan kasta Dalit semakin termarginalkan (BBC.COM 2019). Dalam Partai Bharatiya Janata (BJP) terdapat sebuah ideologi yang dikenal dengan Hindutva. Di mana Hindutva ini pertama kali diusulkan oleh Vinayak Damodar Savarkar sebagai ide politik.

BJP mengatakan Hindutva adalah kendaraan untuk pembangunan sosial dan pemerintahan. Keyakinan BJP sejak 1989 menyatakan bahwa Hindutva adalah sebuah ideologi politik yang mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya India (dw.com 2022). Ideologi Hindutva pada kekuasaan Modi mendorong dan mempromosikan Brahmanisme dengan mengorbankan orang-orang Hindu yang bukan berasal dari kasta elit (Puniyani 2021).

Kebijakan dan strategi Brahmanis ini sangat berdampak pada kaum Dalit khususnya perempuan Dalit. Di mana strategi ini tentu saja akan menghalalkan pembunuhan seorang perempuan Dalit. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dibenarkan bahwa membunuh perempuan Dalit sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada

binatang (Forum 2007, 1-16). Sehingga, pelecehan, pembunuhan atau tindakan kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit tidak dapat didaftarkan dalam First Information Report (FIR). Masyarakat kasta Dalit tidak berani melaporkan tindak kekerasan kepada polisi. Karena mereka takut ancaman pembalasan dari kelompok kasta atas, intimidasi dari kepolisian. Di mana pihak kepolisian juga menyalahgunakan wewenang dan telah melakukan kesepakatan dengan kasta kelas atas (CNN 2014).

Berdasarkan penjelasan Galtung terkait aspek ideologi dalam kekerasan kultural yakni ideologi sebuah negara dapat dipengaruhi atas mayoritas agama di negara tersebut serta ideologi terkadang dipandang sebagai perpanjangan tangan Tuhan sehingga dapat mengendalikan kehidupan (Galtung 1990, 298). Sehingga yang dialami perempuan Dalit dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kekerasan kultural dalam aspek ideologi.

3.3 Kekerasan Kultural dalam Aspek Bahasa

Galtung berpendapat bahwa bahasa dapat menjadi instrumen dalam kekerasan budaya ketika bahasa digunakan untuk melakukan tindakan diskriminasi atau berprasangka terhadap suatu kelompok tertentu melalui kata yang diucapkan. Dalam hal ini bahasa menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan budaya (Galtung 1990, 299).

Dalam tulisannya Galtung juga memberi contoh bahwa ada bahasa tertentu yang memiliki basis Latin seperti Italia, Spanyol, Prancis (dan modern Inggris), tetapi tidak dengan basis Jermanik seperti Jerman dan Norwegia. Hal ini menjadikan wanita tidak terlihat seperti manusia dengan menggunakan kata yang sama untuk jenis kelamin laki-laki (Galtung 1990,299).

Kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit dalam aspek Bahasa terjadi karena bahasa yang digunakan oleh kasta Dalit tentu saja berbeda dengan bahasa yang digunakan kasta yang dianggap lebih tinggi. Dalam beberapa bahasa yang sama, namun pengucapannya dengan cara yang berbeda. Masyarakat Dalit dilarang belajar dan berbicara menggunakan bahasa Sansekerta. Alasannya karena bahasa Sansekerta merupakan milik eksklusif dalam pendidikan Brahmana dan merupakan bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab suci Weda. Hal ini menjadikan perempuan Dalit dianggap sebagai rendah dan tidak sesuai pada kebenaran karena tidak bisa membaca kitab Weda. Hal ini telah berlangsung sejak lama, namun pemerintahan Modi tetap tidak melakukan apapun untuk mengubah hal tersebut (Kaushalya 2015, 102-104).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa yang dialami perempuan Dalit yang tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Sansekerta sebagai kekerasan kultural dalam aspek bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh Galtung bahwa bahasa dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau berprasangka pada suatu kelompok tertentu (Galtung 1990, 299). Di mana perempuan Dalit dianggap rendah dan tidak sesuai pada kebenaran karena tidak bisa membaca kitab suci Weda.

3.4 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ilmu Empiris

Dalam aspek ilmu empiris Galtung menjelaskan bahwa doktrin ekonomi berfungsi sebagai pembenaran sebuah aturan merupakan bagian dari kekerasan budaya yang terkubur dalam ekonomi. Di mana keterbatasan sumber produksi ekonomi menjadikan terhambatnya sumber ekonomi, dan munculnya kesenjangan ekonomi (Galtung 1990, 300).

Pada aspek ilmu empiris ini, Galtung berpendapat dalam praktiknya diartikan bahwa negara-negara yang memiliki bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak terampil harus mengekstrak bahan mentah tersebut. Sementara, negara-negara yang mempunyai modal, teknologi, tenaga kerja yang terampil dan ilmuwan harus memprosesnya. Konsekuensi dari doktrin ini membentuk pembagian kerja vertikal, sehingga kekerasan struktural terjadi di mana-mana baik antar negara maupun dalam negara. Secara hukum keunggulan komparatif yang meligitimasi status quo dan secara struktural tidak dapat ditoleransi. Hukum inilah secara singkat menjadi bagian dari kekerasan budaya yang terdapat dalam aturan ekonomi (Galtung 1990,300-301).

Kekerasan kultural dalam aspek ilmu empiris yang dihadapi oleh perempuan Dalit pada masa pemerintahan Modi. Pada tahun 2016-2017 marak berita terkait penekanan ledakan penduduk. Dalam hal ini pemerintahan Modi berusaha untuk menekan ledakan penduduk dengan membuat suatu kebijakan yang diprediksi akan menjadi solusi dari permasalahan peledakan penduduk. Penduduk yang padat tentu saja menjadikan sumber daya ekonomi semakin terbatas karena banyak yang membutuhkan (Wilson 2018, 94-95).

Pemerintahan Modi beranggapan bahwa keturunan dari masyarakat miskin akan menghambat pertumbuhan ekonomi India. Sehingga pemerintahan Modi melakukan sterilisasi secara massal pada penduduk yang miskin sebagai solusi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di India. Kebijakan sterilisasi massal yang dilakukan pada perempuan miskin, di mana salah satunya adalah perempuan yang berasal dari kelompok Dalit (Wilson 2018), 95-97.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Galtung bahwa doktrin ekonomi juga sebagai pembenaran sebuah aturan (Galtung 1990, 300-301). Sehingga yang dialami perempuan Dalit merupakan bagian kekerasan kultural dalam aspek ilmu empiris. Karena perempuan Dalit disiksa melalui aturan atau kebijakan yang dibentuk pemerintahan Modi untuk meningkatkan perekonomian India yaitu strelisasi masal. Keturunan dari perempuan miskin yang salah satunya adalah kelompok Dalit dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di India.

3.5 Kekerasan Kultural dalam Aspek Kosmologi

Berdasarkan penjelasan Galtung terkait aspek kosmologi dalam kekerasan budaya bahwasanya kosmologi dirancang untuk menyimpan asumsi dasar tentang realita. Dalam hal ini aspek budaya yang telah dijelaskan Galtung dapat dilihat dari asal mula munculnya hal tersebut. Maknanya bahwa kosmologi sebagai konsep untuk memandang sesuatu hal lebih jauh terhadap kenyataan serta menentukan bahwa sesuatu terjadi secara normal dan alami (Galtung 1990, 301).

Selain itu, Galtung juga memaparkan dalam tulisannya bahwa keseluruhan budaya memiliki potensi yang luar biasa dalam tindak kekerasan yang bisa diekspresikan lebih banyak memanifestasikan tingkat budaya dan kemudian digunakan untuk membenarkan yang tidak dapat dibenarkan. Seperti pada perdamaian di Barat, kadang-kadang hal yang berasal dari Barat, adalah sesuatu keajaiban yang mungkin karena untaian yang lebih lembut. Namun, masalahnya adalah pemikiran seperti ini mudah menyebabkan rasa putus asa (Galtung 1990, 301).

Dalam kasus kekerasan kultural pada perempuan Dalit di India pada aspek kosmologi berdasarkan yang sudah dijelaskan pada bab dua bahwa stereotip pada perempuan Dalit sebagai objek seksual dan budaya patriarki masih sangat melekat. Di mana masyarakat Dalit meletakkan posisi perempuan Dalit di bawah laki-laki. Hal ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Modi. Di mana ketika pihak laki-laki Dalit melakukan kesalahan. Perempuan Dalit menjadi bahan taruhan untuk disiksa karena posisi perempuan Dalit di bawah laki-laki (Kang 2019).

Hal ini merupakan pengaruh era pemerintahan Modi yang masih melanggengkan teks sumber hukum Hindu yang dikenal dengan *Manushmriti*. Dalam *Manushmriti* ini menjelaskan bahwa posisi perempuan laki-laki dibedakan dan membenarkan bahwa perempuan Dalit sebagai objek seksual. Hal ini lantas menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Di mana pihak laki-laki lebih superior. Kemudian, menjadikan perempuan Dalit termarginalkan karena hanya dianggap pemuas nafsu atau objek seksual saja. perempuan Dalit dibatasi dalam mengambil keputusan terkait rumah tangga, bahkan perempuan Dalit disiksa oleh pasangannya ketika tidak melahirkan anak laki-laki dan dianggap tidak berbakti kepada pasangan. Pemerintahan Modi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam *Manushmriti* (Varma 2017). Sehingga menyebabkan ketidaksetaraan gender yang berlangsung di India semakin melekat terlebih lagi bagi perempuan Dalit yang dianggap sebagai masyarakat kelas dua yakni posisinya di bawah laki-laki.

Sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan Galtung bahwa yang dialami perempuan Dalit ini terjadi karena memandang suatu hal lebih dalam dan

terjadi secara normal serta alami (Galtung 1990, 301). Di mana perempuan Dalit selama berabad-abad dipandang sebagai objek seksual, hal ini merupakan pengaruh dari teks Manushmriti. Kemudian, Dalit dianggap sebagai bagian kelompok yang tidak tersentuh serta budaya patriarki yang sudah melekat dalam masyarakat Dalit hingga sekarang selama pemerintahan Modi hal tersebut masih berlangsung. Seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang telah dijelaskan pada bab 2 yang menyatakan bahwa kelompok Dalit merupakan kelompok yang tidak tersentuh. Di mana perempuan Dalit yang mengambil air melalui keran yang biasa digunakan kasta atas disiksa serta dipermalukan (Report 2021).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa stereotip dan budaya patriarki terhadap perempuan Dalit di India tersebut akibat pengaruh dari Manushmriti merupakan bagian dari kekerasan kultural pada aspek kosmologi. Hal ini dikarenakan masyarakat India sudah menormalisasikan hal yang terjadi pada kelompok Dalit, khususnya bagi perempuan Dalit.

Tabel 3: Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Dalit di India pada Masa Pemerintahan Modi

No	Bentuk Kekerasan Kultural Pada Perempuan Dalit	Penjelasan Kekerasan Kultural pada Masing-Masing Aspek
1.	Aspek Agama: Menurut Galtung ajaran atau doktrin agama dapat digunakan untuk membenarkan berbagai hal.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem devadasi (pelacuran kuil) yang merupakan kebiasaan sosial dan praktik keagamaan dalam agama Hindu. Di mana dengan adanya devadasi ini perempuan Dalit dieksploitasi seksual secara paksa. • Perempuan Dalit mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti diperkosa, dieksploitasi bahkan dibunuh hanya karena berasal dari kasta rendah yang

		bukan pilihan Tuhan.
2.	Aspek Ideologi: Menurut Galtung ideologi mempengaruhi persepsi dan pandangan manusia.	Hindutva yang menjadi sebuah ideologi politik yang dicetuskan oleh Savalkar mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya India. Ideologi Hindutva pada kekuasaan Modi mendorong dan mempromosikan Brahmanisme dengan mengorbankan orang-orang Hindu yang bukan berasal dari kasta elit. Kebijakan dan strategi Brahmanis ini sangat berdampak pada kaum Dalit khususnya perempuan Dalit. Di mana strategi ini tentu saja akan menghalalkan pembunuhan seorang perempuan Dalit. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dibenarkan bahwa membunuh perempuan Dalit sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada binatang. Sehingga, pelecehan, pembunuhan atau tindakan kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit tidak dapat didaftarkan dalam First Information Report (FIR).
3.	Aspek Bahasa: Galtung berpendapat bahwa bahasa dapat digunakan untuk mendiskriminasi dan beprasangka terhadap suatu kelompok.	Perempuan Dalit dilarang belajar dan berbicara menggunakan bahasa Sansekerta karena merupakan bahasa milik eksklusif pendidikan Brahmana dan kitab weda berbahasa sansekerta. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan masih dilanggengkan hingga sekarang pada pemerintahan Modi. Sehingga perempuan Dalit tidak bisa membaca Weda yang membuat mereka dianggap rendah tidak sesuai dengan kebenaran.
4.	Aspek Ilmu Empiris : Menurut Galtung, ilmu empiris dipengaruhi atas doktrin ekonomi.	Pemerintahan Modi membuat program keluarga berencana atas dasar pengendalian penduduk dengan melakukan sterilisasi secara masal pada perempuan miskin seperti Dalit. Pemerintahan Modi menganggap bahwa keturunan dari Perempuan miskin akan menghambat pertumbuhan ekonomi India.
5.	Aspek kosmologi: Menurut Galtung, kosmologi yang memandang dan	Pemerintahan Modi masih melanggengkan teks hukum Hindu yang konservatif dan patriarki yaitu Manushmriti. Di mana posisi perempuan dibedakan dan membenarkan

	menentukan bahwasanya sesuatu terjadi secara normal dan alami.	bahwa perempuan Dalit sebagai objek seksual. Hal ini menjadikan stereotip pada perempuan Dalit sebagai objek seksual dan budaya patriarki masih sangat kental. Di mana masyarakat Hindu melihat realita dalam memandang orang Dalit itu berpedoman dengan Manushmriti. Hal ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Modi. Di mana ketika pihak laki- laki Dalit melakukan kesalahan. Perempuan Dalit menjadi bahan taruhan untuk disiksa karena posisi perempuan Dalit di bawah laki-laki.
--	--	--

Sumber: Diolah dari jurnal Cultural Violence (Galtung 1990, 291-305).

Pada tabel poin pertama, pada masa pemerintahan Modi sistem devadasi (pelacuran kuil) sebagai praktik keagamaan dalam agama Hindu dan kebiasaan sosial masih berlangsung, yang mana sistem devadasi ini menjadikan perempuan Dalit dieksploitasi secara seksual atas dasar agama. Kemudian para perempuan Dalit diperlakukan tidak manusiawi karena berasal dari kasta rendah yang artinya bukan pilihan dari Tuhan, namun mereka merupakan bagian dari setan, sehingga konsekuensinya mendapat tindakan eksploitasi dan klasisme.

Pada tabel selanjutnya, penulis menyebutkan bahwa ideologi Hindutva yang dicetuskan oleh Savalkar menjadi sebuah ide politik yang mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya India. Ideologi Hindutva pada kekuasaan Modi mendorong dan mempromosikan nilai Brahmanisme dengan mengorbankan orang- orang Hindu yang bukan berasal dari kasta elit.

Kebijakan dan strategi Brahmanis ini sangat berdampak pada kaum Dalit khususnya perempuan Dalit. Di mana strategi ini tentu saja akan menghalalkan pembunuhan seorang perempuan Dalit. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dibenarkan bahwa membunuh perempuan Dalit sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada binatang. Sehingga, pelecehan, pembunuhan atau tindakan kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit tidak dapat didaftarkan dalam First Information Report (FIR). Di mana pihak kepolisian juga menyalahgunakan wewenang dan sepakat dengan kasta atas.

Pada tabel nomor 3 selanjutnya, Perempuan Dalit dilarang belajar dan berbicara menggunakan bahasa Sansekerta karena merupakan bahasa milik eksklusif pendidikan Brahmana dan kitab weda berbahasa sansekerta. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan masih dilanggengkan hingga sekarang pada pemerintahan Modi. Sehingga perempuan Dalit tidak bisa membaca Weda yang membuat mereka dianggap najis tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian, pada tabel nomor 4 penulis menyebutkan bahwa pemerintahan Modi membuat kebijakan untuk menekan ledakan penduduk yang mana kebijakan tersebut membuat perempuan Dalit tersiksa secara fisik dan psikologis.

Pada tabel terakhir yakni nomor 5, penulis menyatakan bahwa Stereotip pada perempuan Dalit sebagai objek seksual dan budaya patriarki masih sangat melekat karena pengaruh dari Manushriti, sehingga masyarakat India memandang Perempuan Dalit memang seperti itu hingga sekarang. Di mana masyarakat Dalit meletakkan posisi perempuan Dalit di bawah laki-laki. Hal

ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Modi. Di mana ketika pihak laki- laki Dalit melakukan kesalahan. Perempuan Dalit menjadi bahan taruhan untuk disiksa karena posisi perempuan Dalit di bawah laki-laki.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa agama, ideologi, bahasa, ilmu empiris dan kosmologi merupakan faktor pendorong terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India. Hal ini sesuai dengan aspek-aspek budaya dalam konsep kekerasan kultural yang dicetuskan oleh Galtung, yang mana aspek-aspek tersebut mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan kultural pada perempuan Dalit. Bahkan pada kasus ini penulis menemukan jika kelima aspek kekerasan kultural ini menjadi akar pendorong terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung pada perempuan Dalit di India. Hal ini terjadi akibat dari masih kuatnya sifat patriarki dan konservatif serta sistem kasta dalam masyarakat India yang sudah tertanam sejak dulu. Sehingga perempuan Dalit selalu termarginalkan sampai sekarang pada masa pemerintahan Modi.

BAB IV

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Tindakan kekerasan yang dialami perempuan Dalit di India sudah terjadi jauh sejak sebelum pemerintahan Modi. Di mana kekerasan yang dialami perempuan Dalit terjadi sejak dari masa kemasa pemerintahan para perdana menteri India. Kekerasan terhadap perempuan Dalit di India ini berlangsung secara terus menerus dengan cara yang sama. Kekerasan terhadap perempuan Dalit di India masih terjadi hingga masa pemerintahan Modi yang merupakan perdana menteri India masa kini. Kekerasan yang terjadi di era ini merupakan kekerasan yang bersifat budaya atau kultural. Kekerasan ini tidak hanya berdampak terhadap psikologis, namun juga akhirnya akan berdampak pada fisik perempuan. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit di India ini seolah sudah menjadi isu yang akan terus berlangsung disetiap pemerintahan India.

Kekerasan kultural ini umumnya terjadi tanpa disadari dan dirasakan baik oleh korban ataupun pelaku. Namun, kekerasan kultural tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak bagi perempuan Dalit di India yang seharusnya menjadi perhatian dari semua kalangan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya kekerasan kultural ini, dapat menjadikan kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang dialami perempuan Dalit di India menjadi tidak terlihat atau tersamarkan bahkan menjadi suatu hal yang dibenarkan.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bentuk dari kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Modi, penulis melihat dan menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami perempuan Dalit di India. Dengan menggunakan konsep kekerasan kultural yang dicetuskan Johan Galtung. Bentuk kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Modi diantaranya adalah kekerasan kultural dalam bentuk aspek agama yang di mana ajaran agama melalui penerapan sistem devadasi (pelacuran kuil) serta tindakan eksploitasi, pemerkosaan bahkan pembunuhan karena berasal dari kasta rendah yang bukan pilihan Tuhan.

Hal ini juga berkaitan dengan kekerasan kultural melalui aspek ideologi, karena ajaran Hindu memiliki kekuatan di India sehingga mempengaruhi ideologi negara tersebut. Ideologi Hindutva yang menjadi sebuah ideologi politik yang dicetuskan oleh Savalkar mempromosikan nilai-nilai agama Hindu sebagai landasan masyarakat dan budaya India. Ideologi Hindutva pada kekuasaan Modi mendorong dan mempromosikan Brahmanisme dengan mengorbankan orang-orang Hindu yang bukan berasal dari kasta elit.

Kebijakan dan strategi Brahmanis ini sangat berdampak pada kaum Dalit khususnya perempuan Dalit. Di mana strategi ini tentu saja akan menghalalkan pembunuhan seorang perempuan Dalit. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dibenarkan bahwa membunuh perempuan Dalit sebagai pelanggaran ringan bagi para Brahmana artinya sama dengan melakukan pembunuhan pada binatang. Sehingga, pelecehan, pembunuhan atau tindakan kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit tidak dapat didaftarkan dalam First Information

Report (FIR).Kemudian, dalam aspek bahasa yang di mana bahasa yang digunakan oleh kasta dalit dengan kasta lain berbeda. Dalam hal ini perempuan Dalit tidak diperbolehkan belajar dan berbicara menggunakan bahasa Sanskerta karena bahasa tersebut merupakan bahasa milik pendidikan eksklusif Brahmana dan merupakan bahasa penulisan kitab suci Weda. Hal tersebut yang menjadi alasan perempuan Dalit di India tidak bisa membaca kitab suci, sehingga dianggap rendah tidak sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya, dalam aspek ilmu empiris yang di mana perempuan Dalit dianggap sebagai penghasil keturunan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Bentuk kekerasan kultural yang terakhir adalah aspek kosmologi yang memandang perempuan Dalit sesuai dengan yang dituliskan dalam Manushmriti bahwa perempuan Dalit secara turun-temurun sebagai objek seksual serta budaya patriarki yang semakin kental baik dalam masyarakat dalit dan masyarakat di India sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah penulis temukan melalui metode pencarian data melalui data sekunder yakni data tulisan berupa jurnal, artikel, serta buku. Bentuk kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit di India ini merupakan suatu hal yang seolah tidak akan pernah berhenti setiap masa pemerintahan.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas penulis berhasil menjawab rumusan masalah penelitian bagaimana bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit di India pada masa pemerintahan Modi. Namun dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada bentuk kekerasan kultural yang

dialami perempuan Dalit di India melalui konsep kekerasan kultural yang dicetuskan oleh Galtung yang berdasarkan aspek-aspek budaya yang dapat menjadi instrumen kekerasan. Sehingga, untuk memperbanyak ilmu dan pengetahuan maka penulis mengajukan beberapa hal untuk melengkapi penelitian yang sudah penulis lakukan.

Berikut adalah beberapa rekomendasi penelitian yang penulis ajukan:

1. Peran dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan Modi terhadap kasta minoritas seperti Dalit terkhusus terhadap perempuan Dalit di India. Pengkajian lebih dalam dan teoritis akan sangat menarik untuk diteliti.
2. Kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit di India sudah terjadi sejak lama dan terjadi dalam setiap periode pemerintahan India. Hal ini tentu menarik untuk diteliti menggunakan metode periodisasi yang di mana penelitian tersebut akan memberikan gambaran perkembangan kekerasan terhadap perempuan Dalit di India setiap masa pemerintahan secara terperinci.
3. Dampak yang terjadi dari adanya kekerasan kultural baik dampak terhadap perempuan Dalit di India, kondisi sosial masyarakat India serta dampak terhadap negara India yang terjadi hingga saat ini. Sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait dampak yang dialami akibat dari kekerasan kultural yang dialami perempuan Dalit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarwal, Ankita. *BJP's welfare progs, Hindutva politics & Modi trumped in UP*. India: thefederal.com, 2022.
- Ansari, Khalid. "Hindu Nationalism in Theory and Practice." *Cultural Anthropology*, 2016: 4-6.
- Aryanti, Hari. *Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India*. Merdeka.Com, 2020.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, 2015.
- BBC.COM. *Hathras case: Dalit women are among the most oppressed in the world*. India: Soutik Biswas, 2020.
- BBC.COM. "Kehidupan Warga Kasta Rendah di India yang Membersihkan Kotoran Manusia tanpa Pelindung." 2019.
- Biason, Marie Vlachova & Lea. "Women in an Insecure World." 9. Switzerland: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2005.
- Bureau, National Crime. <https://ncrb.gov.in/en/crime-in-india-table-addtional-table-and-chapter-contents>. 2013.
- CNN. *Kasta Dalit, Tak Diakui dan Dianggap Hina*. CNN, 2014.
- Dahiya, Rohini. "Torture on Dalit Women in India: Case of "Double Jeopardy"." *Master of Arts in Political Science*, 2021: 1-24.
- Deka, Kaushik. *Indiatoday.in*. Oktober 2020.
<https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20201019-price-of-prejudice-1729903-2020-10-10> (accessed Maret 6, 2022).
- dw.com. *Hindutva: Pemerintah India ingin Nilai-Nilai Hindu diangkat jadi Ideologi Negara*. India: Deutsche Welle, 2022.
- Fedo, Navsarjan Trust dan. "The Situation of Dalit Rural Woman." *Journal National Census*, September 2013.
- Forum, Tamil Nadu Women's. "Unheard Dalit Woman." 2007.
- Fuller, C.J. *Caste Today*. New Delhi: Oxford University Press, 1996.
- Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, 1990: 291-305.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, 1969.
- Haseena. "The History of Dalit Culture and Their Deplorable Situation in India." *Journal Historical Research Letter XXIII* (2015): 1-2.
- Hossain, Tania. "Education and Human Rights of Dalit Woman in India." - - -: 81.

- Kamen, Gale Ellen. "THE STATUS, SURVIVAL, AND CURRENT DILEMMA OF A FEMALE DALIT COBBLER OF INDIA ." 2004.
- Kandasamy, Meena. *The New York times*. Mei 2019.
<https://www.nytimes.com/2019/05/15/opinion/india-elections-dalits.html> (accessed March 1, 2022).
- Kang, Hari Singh. "Defend Dalit Rights." 2019: 4-9.
- Kaushalya, Dr Kaushalya. "Language and Inequality: Dalit Language and Literature." *The West East Institute*, 2015: 100-104.
- Kumar, Soumya Nair Anoop. "Language and Culural Discourse of Indian Dalit Literature from a Subalternist's Perspective." *International Journal of Management and Applied Sciences* III, no. 9 (September 2017): 81-84.
- Mahey, Sonia. "The Status of Dalit Women in India's Caste Based ." (University of Alberta) 154.
- Manimekalai, I. Sivakumar dan K. "Masculinity and Challenges for Woman in Indian Culture." *Journal of International Women's Studies* XXII, no. 5 (June 2021).
- Note, IDSN Briefing. "Caste discrimination in India." 2016: 2-6.
- Puniyani, Ram. *The Politics Behind Rising Atrocities Against Dalits*. The Leaflet , 2021.
- Ramaiah, A. *The Plight of Dalits: A challenge to social work profession*. Towards People Centered Development, 1998.
- Rehatta, Veriena J. B. "Konflik, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Daerah." *Jurnal Sasi* 20 (2014).
- Report, Status. *Dalit Women Rise for Justice*. New Delhi: AIDMAM & NCDHR, 2021.
- Resen, Putu Titah Kawitri. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia." 2011.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. "Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru." In *Qualitative data Analysis*, by Mathew B. Miles & A. Michael Huberman. Jakarta: UI Press, 2009.
- Sarvesh, Tarushikha. "Dalit Women in History: Struggles, Voices, and Counterpublics." *Journal of International Women's Studies* XXII, no. 10 (2021).
- Satyendra Kumar, Rachel Kurian, Annie Namala. "Quest for Equity Urban Dalit Women Employees and Entrepreneurs." November 2010: 27-28.
- Shingal, Ankur. "The Devadasi System: Temple Prostitution in India." *UCLA Women's Law Journal* (University of California) XXII (2015): 107-123.
- Society, Kundan Welfare. "Violence Against Dalit Woman in Rajashtan."
- Solnakar, Nidhi Sadana Shabharwal and Wandana. "Dalit Woman in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste." *GLOBAL JUSTICE : THEORY PRACTICE RHETORIC*, 2015.

- SrIdevi, Y Ramachandra Reddy and RM. "The origin and historical development of Devadasi." *International Journal of Applied Research* V, no. 1 (2019): 106-109.
- Thirugnanam, Balasubramanian. "Violence Againsts Woman's in India." *Journal of Shanghai Jiaotong University* XVI (2020).
- Varma, Rashmi. "Modifying India: Nationalism, Sexual Violence and the Politics of Hindutva." *Feminist Dissen*, 2017: 57-83.
- Vashistha, Dr. Jayshree Singh & Gargi. "A Critical Insight on Status of Dalit Women in India." *International Journal of Research and Analytical Reviews* V, no. 3 (2018): 337-342.
- Vashistha, Dr. Jayshree Singh & Gargi. "A CRITICAL INSIGHT ON STATUS OF DALIT WOMEN IN INDIA." *International Journal of Research and Analytical Reviews* , 2018.
- Wankhede, Haris S. *The Two Faces of Hindutva 's Dalit Agenda*. Jawaharlal Nehru University, New Delhi: The Wire, 2018.
- Wessler, Heinz. "From marginalisation to rediscovery of identity: Dalit and Adivasi voices in Hindi literature." *Studia Neophilologica* 92, no. 2 (2019): 159-174.
- Wilson, Kalpana. "For Reproductive Justice in an Era of Gates and Modi: The Violence of India's Population Policies." *The Feminist Review Collective*, 2018.